

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga telah dapat disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dalam rangka menyajikan informasi kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang telah dirangkum sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) disusun sebagai bentuk pelaporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang mencakup gambaran dan penjelasan atas seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu Tahun 2020.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 mencakup 6 (enam) kelompok informasi utama, yakni:

1. Capaian kinerja makro;
2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketentraman dan ketertiban);
3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah;
5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan; dan
6. Inovasi daerah.

Selanjutnya kami berharap dengan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ini, dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk di masa mendatang.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ini dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Nganjuk, 31 Agustus 2021

PI. BUPATI NGANJUK



Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu tahun 2020, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi.

RLPPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

RLPPD menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut ini kami sampaikan RLPPD sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang mulai meluas di Indonesia termasuk di Kabupaten Nganjuk, mengakibatkan banyak sektor mengalami keterhambatan seperti pembangunan dan perekonomian. Pelemahan sektor ekonomi di Kabupaten Nganjuk berasal dari penurunan sebagian besar kegiatan usaha baik dari skala kecil hingga skala besar dikarenakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya menekan penyebaran virus COVID-19.

Kondisi ini mempengaruhi dan berdampak pada capaian kinerja makro yang meliputi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan yang tersaji dalam data sebagai berikut:

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

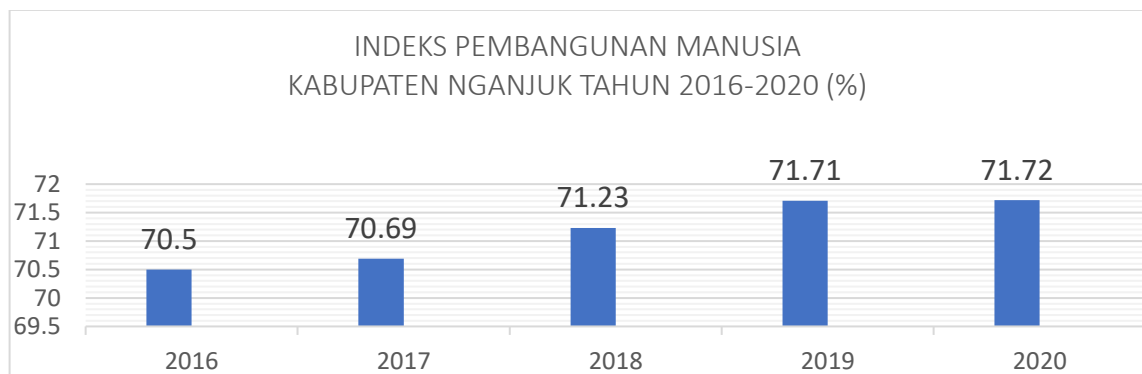
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,71 %	71,72 %	0,01 %
2	Angka Kemiskinan	11,24 %	11,62 %	3,38 %
3	Angka Pengangguran	5,23 %	7,07 %	35,18 %

4	Pertumbuhan Ekonomi	5,36 %	-1,71 %	-131,90 %
5	Pendapatan Per Kapita	17,36 juta rupiah	17,02 juta rupiah	-1,94 %
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,42 %	0,34 %	-19,05 %

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

1. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga tahun 2020, capaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

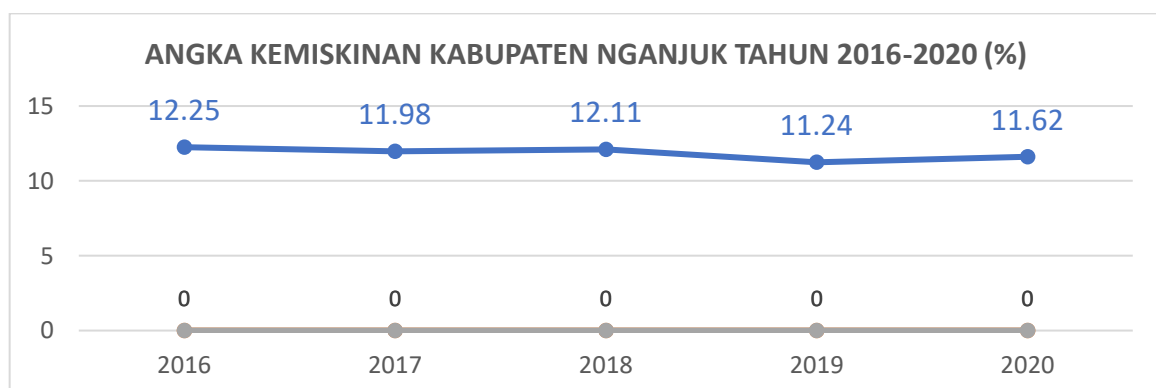


Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan secara berkala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 berada pada angka 70,50 persen, tahun 2017 sebesar 70,69 persen, tahun 2018 sebesar 71,23 persen, tahun 2019 sebesar 71,71 persen dan pada tahun 2020 sebesar 71,72 persen.

2. Angka Kemiskinan

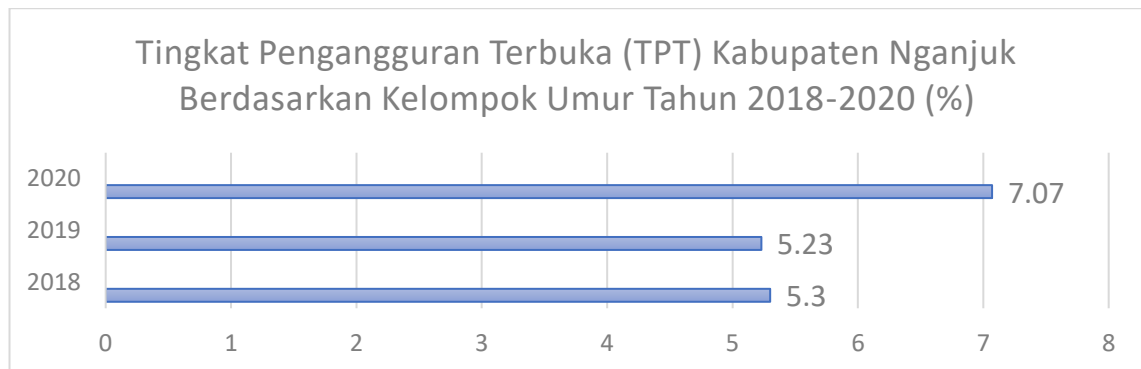
Angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan, di mana pada tahun 2020 angka kemiskinan berada pada level 11,62 persen. Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

3. Angka Pengangguran

Pengangguran terbuka terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena tidak memungkinkan mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Dari data di atas, diketahui bahwa angka pengangguran di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan drastis pada tahun 2020 sebanyak 7,07 persen terhadap angkatan kerja. Hal ini disebabkan karena banyaknya angka usia produktif yang belum memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa pendidikan di sekolah/lembaga pendidikan. Adapun dengan terjadinya pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak perusahaan dan pelaku usaha yang memutuskan hubungan kerja pegawai dan tidak membuka lowongan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk akan terus berupaya untuk menambah peluang dan kesempatan kerja bagi para angkatan kerja. Salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta mengajak penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi kreatif.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Dari data tersaji di atas, dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 pada level 5,36 persen dan di tahun 2020 mengalami penurunan drastis hingga mencapai level -1,71 persen. Hal ini

disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk.

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita Kabupaten Nganjuk berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 sebesar 17,36 juta rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai angka 17,02 juta rupiah.



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan/ketimpangan pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah. Gini ratio memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan kesenjangan ekonomi maksimal.

Nilai Gini Ratio	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 - 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Pada periode tahun 2016-2020, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Nganjuk mengalami perubahan yang tidak signifikan. Pada tahun 2020, ketimpangan penduduk mengalami penurunan pada level 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Nganjuk berada pada tingkat rendah. Adapun ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, bahwa jenjang pendidikan yang diwajibkan untuk difasilitasi pelayanan dasarnya oleh Pemerintah Daerah adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pendidikan Kesetaraan.

1.1 Target Capaian Urusan Pendidikan

Penetapan target difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Adapun penetapan target urusan pendidikan pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100%	
3.	Pendidikan Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (SMP/MTS)	100%	

4.	Pendidikan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
----	-----------------------	--	------	--

1.2 Realisasi Pencapaian Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Sumber Data
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	91,43%	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
2.	Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	99,20%	
3.	Pendidikan Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (SMP/MTS)	96,51%	
4.	Pendidikan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0%	

Realisasi pada urusan bidang pendidikan secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pendidikan kesetaraan mencapai angka 0%, di mana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada warga negara usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan, yang salah satu penyebabnya adalah putus sekolah.

2. Urusan Kesehatan

Terdapat 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yakni:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2.1 Target Capaian Urusan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan digunakan sebagai acuan dasar dalam penentuan target capaian urusan kesehatan selama kurun waktu tahun 2020 sebagai berikut:

No	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Prosentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Setiap Tahun
2.	Prosentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100%	
3.	Prosentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
4.	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	
5.	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
6.	Prosentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	
7.	Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	
8.	Prosentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
9.	Prosentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
10.	Prosentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
11.	Prosentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	100%	

12.	Prosentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	
-----	--	------	--

2.2 Realisasi Capaian Urusan Kesehatan

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, di mana tidak hanya ditunjang oleh APBD tetapi juga mendapat dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Adapun realisasi urusan kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

No	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Sumber Data
1.	Prosentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	80,61 %	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
2.	Prosentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	78,96 %	
3.	Prosentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,52 %	
4.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	64,07 %	
5.	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	96,79 %	
6.	Prosentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	14,05 %	
7.	Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	35,36 %	
8.	Prosentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	14,45 %	
9.	Prosentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	78,05 %	
10.	Prosentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	137,53 %	
11.	Prosentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	100%	
12.	Prosentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

3.1 Target Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	

3.2 Realisasi Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Sumber Data
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	90,40 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,85 %	

4. Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

4.1 Target Capaian Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100%	

4.2 Realisasi Capaian Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Sumber Data
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100%	

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

Daerah Kabupaten/Kota, Target Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

5.1 Target Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
4	Pelayanan dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	

5.2 Realisasi Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Sumber Data
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
4	Pelayanan dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	

6. Urusan Sosial

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelayanan dasar yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

6.1 Target Capaian Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	
4	Rehabilitasi sosial dasar khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	

6.2 Realisasi Capaian Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Sumber Data
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	99,57%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	90,91%	
4	Rehabilitasi sosial dasar khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	

C. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang telah disusun.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 memperoleh skor 3,2640 dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi** dan mendapat peringkat **68** dalam skala nasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016;
- b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 memperoleh skor 3,1215 dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi** dan mendapat peringkat **56** dalam skala nasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017;
- c. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 memperoleh skor 3,2244 dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi**;
- d. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dan Tahun 2020 masih dalam tahap penilaian.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Nganjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Opini Atas Laporan Keuangan
1.	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 sampai dengan 2020, Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Nganjuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kecuali pada tahun 2016 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menindaklanjuti hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2020 dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

D. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 2.335.585.700.404,39 dan terealisasi sebesar Rp. 2.435.396.958.079,43 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 124,47%, Dana Perimbangan terealisasi 100,42%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 102,56%.

Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Pendapatan Setelah Perubahan	Realisasi Pendapatan	Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	323.260.574.754,39	402.347.144.361,43	79.086.569.607,04	124,47
2.	Dana Perimbangan	1.435.075.828.974,00	1.441.047.387.801,00	5.971.558.827,00	100,42
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	577.249.296.676,00	592.002.425.917,00	14.753.129.241,00	102,56
	TOTAL	2.335.585.700.404,39	2.435.396.958.079,43	99.811.257.675,04	104,27

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target belanja daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.649.031.783.182,70. Dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.2.383.277.058.326,48 atau tercapai sebesar 89,97%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Belanja Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	Rp	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.668.484.245.222,51	1.467.171.772.221,10	(201.312.473.001,41)	87,93
2.	Belanja Langsung	980.547.537.960,19	916.105.286.105,38	(64.442.251.854,81)	93,43

	TOTAL	2.649.031.783.182,70	2.383.277.058.326,48	(265.754.724.856,22)	89,97
--	-------	----------------------	----------------------	----------------------	-------

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 337.446.082.778,31 dan terealisasi sebesar Rp. 319.626.566.750,81. Sedangkan target pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.000.000.000,00. Rincian realisasi pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Pembiayaan Setelah Perubahan	Realisasi Pembiayaan	Rp	%
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	337.446.082.778,31	319.626.566.750,81	(17.819.516.027,50)	94,72
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.000.000.000,00	6.000.000.000,00	(18.000.000.000,00)	25,00
	TOTAL	313.446.082.778,31	313.626.566.750,81	180.483.972,50	100,06

E. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN, DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

1. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp. 402.347.144.361,43 atau tercapai sebesar 124,47% dari seluruh target PAD sebesar Rp. 323.260.574.754,39. Rincian target dan realisasi PAD tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	88.074.800.000,00	110.299.917.866,92	22.225.117.866,92	125,23
2.	Hasil Retribusi Daerah	25.238.562.856,00	26.520.448.228,21	1.281.885.372,21	105,08
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.741.455.562,80	3.741.455.562,80	0,00	100,00
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	206.205.756.335,59	261.785.322.703,50	55.579.566.367,91	126,95
	TOTAL	323.260.574.754,39	402.347.144.361,43	79.086.569.607,04	124,47

1.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.441.047.387.801,00 atau 100,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.435.075.828.974,00. Rincian target dan realisasi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81.837.395.614,00	91.794.925.681,00	9.957.530.067,00	112,17
2.	Dana Alokasi Umum	1.005.432.269.000,00	998.778.363.000,00	(6.653.906.000,00)	99,34
3.	Dana Alokasi Khusus	347.806.164.360,00	350.474.099.120,00	2.667.934.760,00	100,77
	TOTAL	1.435.075.828.974,00	1.441.047.387.801,00	5.971.558.827,00	100,42

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.592.002.425.917,00 atau 102,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.577.249.296.676,00. Rincian target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1.	Pendapatan Hibah	108.957.100.000,00	108.283.180.000,00	(673.920.000,00)	99,38
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	110.692.787.676,00	126.179.042.567,00	15.486.254.891,00	113,99
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	351.110.500.000,00	351.110.500.000,00	0,00	100,00
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.488.909.000,00	6.429.703.350,00	(59.205.650,00)	99,09
	TOTAL	577.249.296.676,00	592.002.425.917,00	14.753.129.241,00	102,56

2. Target dan Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran

2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.1.467.171.772.221,10 atau 87,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.668.484.245.222,51. Rincian target dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1.	Belanja Pegawai	1.050.546.571.840,00	901.544.213.209,00	(149.002.358.631,00)	85,82
2.	Belanja Bunga	92.060.057,15	0,00	(92.060.057,15)	0,00
3.	Belanja Hibah	46.161.927.500,00	44.625.918.595,00	(1.536.008.905,00)	96,67
4.	Belanja Bantuan Sosial	13.783.951.100,00	11.733.200.000,00	(2.050.751.100,00)	85,12
5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.331.337.000,00	11.310.947.410,00	(20.389.590,00)	99,82
6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	394.647.581.200,00	394.647.581.200,00	0,00	100,00
7.	Belanja Tidak Terduga	151.920.816.525,36	103.309.911.807,10	(48.610.904.718,26)	68,00
	TOTAL	1.668.484.245.222,51	1.467.171.772.221,10	(201.312.473.001,41)	87,93

2.2 Belanja Langsung

Belanja langsung tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 916.105.286.105,38 atau 93,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 980.547.537.960,19. Rincian target dan realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1.	Belanja Pegawai	121.305.106.858,00	117.824.410.118,00	(3.480.696.740,00)	97,13
2.	Belanja Barang dan Jasa	588.481.646.541,49	548.650.335.562,89	(39.831.310.978,60)	93,23
3.	Belanja Modal	270.760.784.560,70	249.630.540.424,49	(21.130.244.136,21)	92,20
	TOTAL	980.547.537.960,19	916.105.286.105,38	(64.442.251.854,81)	93,43

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.319.626.566.750,81 atau 94.72%, dari target yang dianggarkan sebesar Rp.337.446.082.778,31. Rincian target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	319.354.816.778,31	319.354.816.778,31	0,00	100,00
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	18.000.000.000,00	0,00	(18.000.000.000,00)	0,00
3.	Penerimaan Piutang Daerah	91.266.000,00	271.749.972,50	180.483.972,50	297,76
	TOTAL	337.446.082.778,31	319.626.566.750,81	(17.819.516.027,50)	94,72

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.6.000.000.000,00 atau 25% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.24.000.000.000,00. Rincian target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	100,00
2.	Pembayaran Pokok Utang	18.000.000.000,00	0,00	(18.000.000.000,00)	0,00
	TOTAL	24.000.000.000,00	6.000.000.000,00	(18.000.000.000,00)	25,00

F. INOVASI DAERAH

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Pasal 4 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pada tahun 2020 Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Inovasi yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil masuk dalam daftar TOP 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) se-Jawa Timur.

Berikut ini daftar inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020:

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
1	Iva Tante Cerdas (Iva Test Wanita Tersedia Secara Cepat Dekat Aman dan Sehat)	Puskesmas Berbek
2	BTQ Berkah (Baca Tulis Al-Qur'an Bermutu Karakter dan Akhlakul Karimah)	SD Negeri 5 Sonoageng Kecamatan Prambon
3	CETING E ABAH KOLEL (Cegah Stunting Dengan Memanfaatkan Bank Sampah, Pekarangan dan Kolam Lele)	Desa Senjayan Kecamatan Gondang
4	KELINK EMAS (Konsultasi Kesehatan Terlink Internet Masyarakat)	Puskesmas Sukomoro
5	OJO STUNTING (Mengenalkan Stunting Pada Kaum Milenial, Masyarakat dan Mempermudah Kader Kesehatan Melakukan Skrining Melalui Aplikasi Berbasis Android)	Puskesmas Berbek
6	CERIA SEHAT (Cerdaskan Ibu Anak Sehat)	Puskesmas Pace
7	KOPIKO – Whatsapp Blitaran Berhati (Membudayakan Karakter Peduli Lingkungan Pada Mu rid SD Negeri 2 Blitaran)	SD Negeri 2 Sukomoro
8	URCPJJ (Unit Reaksi Cepat Pengelolaan Jalan dan Jembatan)	Dinas PUPR
9	KLIK KLOK WASPADA (Klinik Konsultasi Pengawasan Pada Desa)	Inspektorat Daerah
10	Aplikasi SEDUDO	Dinas Komunikasi dan Informasi
11	Aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Manajemen ASN)	Badan Kepegawaian Daerah
12	SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	Badan Pendapatan Daerah
13	SMILE (Sistem Manajemen Informasi dan Pelaporan Elektronik Puskesmas)	Dinas Kesehatan

PENUTUP

Dalam penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2020, kami menyusun sesuai dengan kondisi riil yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kami menyadari apabila terdapat keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Nganjuk tidak lain merupakan hasil kerja keras, dukungan, peran serta dan komitmen seluruh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan dari DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, dan dukungan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian disamping keberhasilan yang dapat dicapai tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun kami yakin dan optimis bahwa segala permasalahan yang belum dapat diselesaikan tersebut akan menjadi motivasi kami untuk terus berkarya dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi Kabupaten Nganjuk “TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESONOTO KUTHO)”

Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan penulisan, untuk itu demi kesempurnaan laporan ini kami mengharapkan masukan dan sumbang saran serta pemikiran dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Demikian yang dapat kami sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk terus meningkatkan semangat dan pengabdian dalam membangun Kabupaten Nganjuk yang kami cintai sehingga semakin maju dan sejahtera. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nganjuk, 31 Agustus 2021

Plt. BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA